

KAJIAN PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (STUDI PADA PROGRAM UPPKS KAMPUNG KB KELURAHAN DULALOWO KOTA GORONTALO)

Syamsul¹
Achmad Risa Mediansyah²
Syaiful Pakaya³

Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

¹e_mail: tomallawa@gmail.com

²e_mail: risamediansyah@gmail.com

³e_mail: p_syaiful@yahoo.com

ABSTRAK

Kampung KB merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung atau setara dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penelitian bertujuan mengkaji dukungan pemerintah dan sektor lainnya dalam pemberdayaan keluarga di Kampung KB Kelurahan Dulalowo, manfaat program UPPKS dari sisi pendapatan dan kesempatan kerja bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kampung KB Kelurahan Dulalowo, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program UPPKS di Kampung KB Kelurahan Dulalowo. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan model analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya dukungan pemerintah dan sektor lainnya dalam program UPPKS. Manfaat dalam peningkatan pendapatan keluarga belum dirasakan pada anggota kelompok UPPKS Nangka, meskipun kesempatan kerja mulai dirasakan masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program UPPKS terlihat dari lemahnya integrasi program UPPKS dengan program instansi lainnya, aspek permodalan, dan pelatihan keterampilan dan pemasaran yang berkesinambungan.

Kata Kunci: UPPKS, Pendapatan keluarga, Kampung KB

ABSTRACT

KB Village is a community empowerment program to improve the quality of life of people at the village level or equivalent in order to create quality small families. The research aims to examine the support of the government and other sectors in family empowerment in the KB Village in Dulalowo Village, the benefits of the UPPKS program in terms of income and employment opportunities for underprivileged and prosperous families I in the KB Village in the Dulalowo Village, and the obstacles that occur in the process of implementing the UPPKS program in KB Village, Dulalowo Village. The data analysis method in this study uses a descriptive qualitative approach with the Miles and Huberman data analysis model. The results showed that the government and other sectors have not been maximized in UPPKS programs. Benefits in increasing family income have not been felt by members of the Jackfruit UPPKS group, although employment opportunities have begun to be felt by the community, especially the Fertile Age Couple (PUS). Obstacles in the implementation of the UPPKS program can be seen from the weak integration of the UPPKS program with other agency programs, aspects of capital, and ongoing skills and marketing training.

Keywords: UPPKS, Family income, KB Village

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dari tahun 2003-2016 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.15 persen. Selama dalam kurung 13 tahun *trend* pertumbuhan penduduk masih dianggap stabil. Namun, stabilnya pertumbuhan penduduk tentunya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan

kependudukan, karena penduduk yang terkendali menyisahkan persoalan baru, khususnya persoalan kesejahteraan keluarga.

Kampung KB merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung atau setara. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya terintegrasi dengan program keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo baru terbentuk satu Kampung KB yaitu di keluraha Dulalowo, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.224 jiwa dan 1.142 kepala keluarga. Di dalam Kampung KB terdapat 4 kelompok kegiatan (Poktan) yang aktif, namun yang paling rendah pasrtisipasi keluarga terhadap kelompok kegiatan yaitu kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebesar 0,44 persen. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang berangotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berintraksidan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

Fenomena yang terjadi pada keluarga yang ada di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yaitu masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera, sejahtera I dan II. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo tahun 2015, bahwa Jumlah keluarga menurut tahapan pra sejahtera dan sejahtera I dan II pada Tahun 2014 di Kelurahan Dulalowo sebanyak 798 keluarga, peringkat ketiga terbanyak dari enam kelurahan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Artinya, masih terdapat keluarga yang tinggal di Kecamatan Kota Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pra sejahtera), terdapat pula keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar namun tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologinya (sejahtera I). Permasalahan yang muncul dari fenomena di atas adalah manfaat program UPPKS belum sepenuhnya dinikmati semua keluarga, khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang masih besar jumlahnya. Belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lintas sektor dalam upaya pemberdayaan keluarga. Rapuhnya ketahanan keluarga mengakibatkan perceraian yang berdampak terhadap hilangnya minat dan semangat untuk berusaha, khususnya bagi perempuan.

Kajian usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) didukung dari hasil penelitian terdahulu, seperti penelitan yang dilakukan (Mardiyono, 2016) tentang model pengelolaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan akseptor KB. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memberikan dampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan anggotanya, sedangkan dampak terhadap program KB khususnya peningkatan akseptor KB belum optimal. Penelitian oleh Panorama, (2017) tentang pengaruh kerja sama usaha terhadap produktivitas kerja anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap variabel produktivitas. Penelitian oleh Susianti, (2017) tentang efektivitas program upps sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi. Penelitian Susianti, (2017) tentang efektivitas program UPPKS sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan terjadi perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat (anggota UPPKS) secara signifikan yang dinilai dari aspek jam kerja dan pendapatan pada saat sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS. Kondisi ini menjelaskan bahwa keluarga khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga. Tujuan penelitian ini mengkaji dukungan pemerintah dan sektor lainnya dalam pemberdayaan keluarga di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, manfaat program UPPKS dari sisi pendapatan dan kesempatan kerja bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kelurahan Dulalowo, dan hambatan-

hamabatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program UPPKS di Kelurahan Dulalowo.

Kajian Literatur

Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima seseorang atas keikutsertaan dalam proses produksi barang dan jasa. Pendapatan ini disebut pendapatan dari kerja (*labor income*). Pendapatan yang diperoleh tidak dari kerja diantaranya adalah pemberian orang lain, pendapatan buangan uang, pendapatan dari usaha yang dijalankan orang lain, dan pendapatan bunga uang dan pendapatan persewaan kamar/rumah (Heryendi, 2013). Menurut Gusfrianti (2010) pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari keseluruhan anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai kemampuan mereka. Oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan seseorang akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka untuk konsumsi suatu barang. Jadi pendapatan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang. Pendapatan keluarga dalam penelitian ini adalah penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga sebagai bentuk balas jasa dalam proses produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kesejahteraan Keluarga

Menurut Liana, (2016), bahwa kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Puspitawati (2013) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibedakan ke dalam kesejahteraan ekonomi keluarga (*family economic well-being*), diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Kesejahteraan keluarga dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang harmonis antara anggota keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, sosial, ekonomi, dan material sebagai pertahanan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan keluarga.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program UPPKS merupakan program kelompok ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, yang beranggotakan ibu-ibu/wanita dari golongan keluarga pra-KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+ (Susianti, 2017). Manfaat dari program UPPKS sendiri adalah pendapatan keluarga meningkat, ketahanan ekonomi sekeluarga lebih mantap karena didukung sumber pendapatan yang tetap. Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka kebutuhan dasar terpenuhi, anggota juga dapat memanfaatkan waktu luang untuk berkegiatan ekonomi dan memiliki tabungan guna menambah modal usaha.

Landasan Hukum mengenai pengelolaan UPPKS adalah Peraturan BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Bantuan Modal Usaha kelompok UPPKS. Melalui sumberdana sebagai sumber modal melalui PNPM mandiri, Kredit BRI dll (Mardiyono, 2016).

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyono (2016) tentang Model Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB. Penelitian dilakukan di Kabupaten Magetan, Mojokerto dan

Malang. Metode penelitian menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak semua kabupaten/kota menindaklanjuti peraturan pusat dengan peraturan di tingkat daerah. Kemudahan mendapat modal untuk UPPKS adalah sumber modal dari APBN dan APBD karena persyaratan yang lebih memungkinkan untuk Gakin dan kesinambungan lebih bisa diharapkan. Dana CSR belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat (anggota UPPKS) termasuk petugas kesehatan (bidan, dokter puskesmas) kurang tersosialisasi dengan tujuan UPPKS terkait dengan program KB. UPPKS memberikan dampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan anggotanya, sedangkan dampak terhadap program KB khususnya peningkatan akseptor KB belum optimal. **Gap:** Penelitian tersebut lebih menitik beratkan kepada pasangan usia subur yang mengikuti KB (akseptor KB) sebagai anggota UPPKS, implementasi peraturan, dan permodalan program UPPKS. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada kategori keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, kemudian manfaat program UPPKS dari segi pendapatan dan kesempatan kerja keluarga, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program UPPKS.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Panorama, (2017) tentang Pengaruh Kerja Sama Usaha terhadap Produktivitas Kerja Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Lokasi penelitian di Kecamatan Sukarami Palembang, dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Menggunakan variabel kerjasama usaha (bagi hasil) sebagai variabel independen dan produktivitas variabel dependen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap variabel produktivitas. Penulis menganjurkan agar penerapan sistem bagi hasil di kelompok usaha lain juga dilakukan, sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat dan keuntungan semakin tinggi. Selain itu, pihak UPPKS juga hendaknya menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan harapan pembiayaan yang diberikan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur'an dan Hadist. **Gap:** penelitian terfokus pada kerjasama usaha dan produktivitas kerja anggota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mendalam yaitu tentang dukungan pemerintah, manfaat program UPPKS bagi anggota, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program UPPKS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susianti, (2017) tentang Efektivitas Program UPPKS Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi: Studi Kasus Kelurahan Srimartani, Piyungan, Bantul. Menggunakan metode *judgment sampling* melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan terjadi perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat (anggota UPPKS) secara signifikan yang dinilai dari aspek jam kerja dan pendapatan pada saat sebelum dan sesudah mengikuti Program UPPKS. Kondisi ini menjelaskan bahwa keluarga khususnya Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga. **Gap:** penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari aspek dukungan pemerintah dan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan program UPPKS.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah dukungan pemerintah dan sektor lainnya dalam pemberdayaan keluarga kelompok UPPKS, manfaat program UPPKS dari sisi pendapatan dan kesempatan kerja bagi keluarga, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan dua pendekatan yaitu, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada pengurus, anggota, pemerintah dan *stakeholder*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan model analisis data Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:334).

Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok UPPKS di Kampung KB Kelurahan Dulalowo

Kelurahan Dulalowo merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Kampung KB di Kelurahan Dulalowo di canangkan pada tanggal 27 September 2017. Jumlah penduduk Kelurahan Dulalowo pada saat pencanangan sebanyak 3.489 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.138. Keluarga yang memiliki sebanyak 163, keluarga yang memiliki remaja sebanyak 400, dan keluarga yang memiliki lansia sebanyak 226. Sarana dan prasarana di Kampung KB tersedianya sekretariat KKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Kelompok UPPKS, PIK-R, dan Rumah Dataku.

Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Program

Stakeholder merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keberhasilan suatu program, terlebih pada program UPPKS yang kelompoknya masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah BKKBN perwakilan Provinsi Gorontalo, Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, Pemerintah Kecamatan Kota Tengah, Pemerintah Kelurahan Dulalowo, Petugas PLKB, dan Tokoh masyarakat.

Pada tingkat provinsi pelaksanaan UPPKS ditujukan untuk semua wilayah, tidak hanya di daerah perdesaan, namun juga di perkotaan terutama daerah kumuh dan miskin. Pemerintah melalui BKKBN mengulirkan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok UPPKS, terutama bagi keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I) dengan tujuan membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga. Oleh karenanya kelompok UPPKS harus mendapatkan pendampingan secara berkesinambungan yang bukan saja dilakukan oleh BKKBN sepenuhnya melainkan sektor-sektor lainnya. Hingga saat ini BKKBN perwakilan provinsi Gorontalo sebagaimana amant dalam Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 48 ayat 1 bagian (f) menyatakan bahwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga. Upaya yang dilakukan selama ini dengan pemberian bantuan langsung tunai, bimbingan usaha, dan pemberdayaan keluarga.

Pada tingkat Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo juga sangat berperan dalam keberhasilan program UPPKS khususnya di kampung KB Kelurahan Dulalowo. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bahwa untuk secara teknis pelaksanaan program UPPKS itu ada pada Petugas Layana Keluarga Berencana (PLKB) tingkat kecamatan dan kelurahan. Saat ini yang banyak menjadi anggota kelompok yaitu keluarga sejahtera I (KS I) dalam 1 kelompok biasanya terdiri dari 10 orang dan anggotanya fokus pada pasangan usia subur (PUS). Bentuk interpersi pada program UPPKS di tingkat Kota hanya dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi itu pun untuk kegiatan berkaitan UPPKS masih sedikit kegiatannya dibandingkan dengan program lainnya seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Untuk bantuan dalam bentuk dana tunai bukan menjadi wewenang kami melainkan wewenang di tingkat provinsi.

Pada tingkat Kecamatan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Kota Tengah yang mana lokasi Kampung KB dan pelaksanaan program berada di wilayah Kecamatan Kota Tengah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan

masyarakat mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program UPPKS di Kelurahan Dulalowo melalui koordinasi di tingkat kecamatan dan sangat rutin koordinasinya baik pelaksanaan awal hingga saat ini bahkan pada saat *lounching* kampung KB kecamatan berperan dalam kegiatannya. Kecamatan punya kewajiban dalam mendukung pelaksanaan program UPPKS. Dalam hal pelatihan peningkatan pendapatan keluarga kepada Kelompok UPPKS yang melakukan adalah penyuluhnya, pihak kecamatan biasanya menyediakan tempat dan di panggil memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kepada kelompok. Untuk yang menghimpun dan menggerakkan anggota kelompok itu adalah penyuluhnya langsung. Program UPPKS memberikan dampak pada tingkat kecamatan (namun tidak dikemukakan apa dampaknya), hanya saja yang mengetahui secara pasti adalah penyuluh. Secara pasti yang diketahui dalam pelaksanaannya hanya pada kegiatan-kegiatan yang terkait pasangan usia subur, balita dan remaja. Selama ini, penyuluh sangat bersama kader aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan dan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan.

Pada Tingkat Kelurahan dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Dulalowo sebagai tempat lokasi Kampung KB dan pelaksanaan program UPPKS. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pegawai kelurahan bahwa kami mengetahui terkait adanya program UPPKS di kelurahan Dulalowo namun untuk lebih jelasnya itu langsung saja kepada petugas karena bukan pokja kami. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh dan kader beserta kelompok itu dilakukan di Aula Kelurahan. Data anggota kelompok UPPKS tidak dimiliki oleh kelurahan dan hanya ada pada petugas PPKBD. Semenjak adanya program UPPKS belum dapat diketahui secara pasti apakah ada dampak langsungnya karena bukan kami yang melakukan evaluasi, namun jika melihat dari data keluarga miskin itu mengalami penurunan dimana tahun 2018 sebagaimana di aplikasi itu sebanyak 242 keluarga setelah di verifikasi itu kurang lebih 198 keluarga.

Pada tingkat Balai Penyuluh KB (BPKB) dalam hal ini PPKBD Kelurahan Dulalowo yang terdiri dari 5 orang yang salah satu program dari 12 program adalah melakukan pengembangan wawasan terpadu (bina keluarga dan UPPKS). Dari hasil wawancara mengemukakan bahwa kehadiran UPPKS seiring dengan di canangkannya kampung KB di Desa Dulalowo hal ini merupakan program yang terintegrasi dan harus ada di Kampung KB seperti PIC-R, BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. Keterlibatan *stkaeholder* dalam menginterpersi Kampung KB khususnya pada kelompok UPPKS masih pada OPD dan Organisasi Masyarakat, seperti pemerintah provinsi, Kota, Kecamatan, Lurah. Selain itu, ada jg PPK, tokoh masyarakat, Dinas Perindagkop, dan Badan Lingkungan Hidup. Untuk sektor swasta hanya sebatas memberikan pelatihan atau sosialisasi yang biasanya di selenggarakan BKKBN provinsi atau Kota. Pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan biasanya memfasilitasi dari segi tempat dalam kegiatan. Namun di tingkat Kelurahan yang kami sesalkan bahwa pihak kelurahan tidak mau tahu soal program ini, karena selalu berfikir bukan pokja kami. Pada hal kan Kelurahan itu yang harus berperan penuh, karena selain dari program lintas sektor juga program ini dilaksanakan pada masyarakat yang berada di wilayah pemerintahannya.

Lebih lanjut, untuk kelompok UPPKS di Kelurahan Dulalowo yang terbentuk baru 1 (satu) kelompok yang aktif dan BPKB terus mengembangkan kelompok-kelompok UPPKS di Dulalowo. Kelompok UPPKS di beri nama Kelompok Nangka yang beranggotakan 5 orang dan di Ketuai oleh ibu Siti Hernawati Gani. Kelompok Nangka sering kami utus untuk mendapatkan pelatihan baik dari tingkat provinsi dan Kota, dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dalam membangun usaha di kelompoknya, selain itu dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kelompok UPPKS Nangka terdiri perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) yang di ambil dari kategori Keluarga Sejahtera satu (KS I) untuk keluarga pra sejahtera sudah tidak ada lagi karena dasar penentu keluarga pra sejahtera itu dengan istilah ALADIN (atap, lantai, dinding) lantainya masih tanah, dindingnya triples, dan atapnya rumbia. Karena banyaknya bantuan sehingga tidak ada lagi yang masuk keluarga kategori tersebut. Untuk data pra

sejahtera dan sejahtera itu kami tidak memiliki datanya karena langsung terinput di provinsi. Usaha yang dijalankan selama ini dari kelompok Nangka adalah mendaur ulang barang bekas, seperti botol plastik kemudian di jadikan hiasan-hiasan rumah.

Berdasarkan dari keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam program UPPKS di Kelurahan Dulalowo menunjukkan pada dasarnya program UPPKS di ketahui keberadaanya di Kampung KB. Berbagai kegiatanpun di fasilitasi oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Namun, hal ini menjadi timpang di karenakan belum adanya intervensi langsung dari pemerintah setempat, dan swasta kepada kelompok UPPKS. Pada hal program UPPKS ini merupakan program Lintas Sektor yang di cetuskan oleh BKKBN. UPPKS merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari penelusuran wawancara peneliti menemukan bahwa yang melaksanakan program UPPKS ini adalah BPKB sebagai perpanjangan tangan BKKBN provinsi Gorontalo dan Dinas PPKB-PPPA Kota Gorontalo. Bahkan di tingkat intansi Kota, Kecamatan, Kelurahan tidak mengetahui jumlah kelompok UPPKS, nama-nama anggota UPPKS, dan jenis kegiatan yang dilakukan, dan intervensi apa saja yang sudah diberikan. Semuanya hanya di ketahui oleh petugas Balai Penyulu KB Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Hal ini dapat dikatakan bahwa banyak program yang di laksanakan pada masyarakat berjalan sendiri-sendiri, tidak terdapat integrasi dari program satu ke program lainnya. Sehingga, konsep pemberdayaan juga berjalan sendiri-sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan dari berbagai hasil yang dicapai. Dalam kaitan ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah, bahkan seluruh institusi pengelola pembangunan berkewajiban menciptakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat (Suwondo, 2017).

Hal ini juga diungkapkan dalam jurnal Mardiyono (2016) bahwa melalui program UPPKS, pemerintah memberikan bantuan penguatan modal yang bersifat pinjaman kepada masyarakat tersebut. Dengan pinjaman tersebut harapannya masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan untuk menciptakan usaha baru maupun memperbesar modal atas usaha yang dimilikinya agar kesejahterannya meningkat. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan KB yang masih rendah, UPPKS juga memiliki daya ungkit terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesertaan dalam program KB. Sedangkan menurut Indriastuti dalam Susianti (2017) bahwa berbagai upaya telah dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar keluarga mampu mengembangkan prakarsa dan meningkatkan kesejahteraan. Hingga muncul program UPPKS yang merupakan tindak lanjut program Keluarga Berencana (KB) oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Manfaat Program UPPKS bagi Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga

Manfaat dari program UPPKS sendiri adalah pendapatan keluarga meningkat, ketahanan ekonomi sekeluarga lebih mantap karena didukung sumber pendapatan yang tetap. Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka kebutuhan dasar terpenuhi, anggota juga dapat memanfaatkan waktu luang untuk berkegiatan ekonomi dan memiliki tabungan guna menambahmodal usaha. Dengan begitu keluarga lebih bisa mandiri karena mampu mengenali dan memanfaatkan bakat dan kemampuan yang dimiliki, serta dalam hal keuangan atau ekonomi tidak tergantung pada orang lain. Hal ini dapat diketahui melalui kebiasaan hidup sehari-hari, seperti: apabila ada anggota keluarga yang sakit, biaya untuk ke dokter tersedia, serta mau dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Banyak anak usia sekolah yang tidak putus sekolah, tingkat kesehatan keluarga meningkat, hal ini dibuktikan dengan jaranganya anggota keluarga sakit yang berarti ketahanan tubuh keluarga meningkat karena makanan dan

gizi semakin terjamin. Manfaat untuk kelompok UPPKS nampak pada kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, dan kepedulian sosial (BKKBN, Susianti 2017).

Kelompok UPPKS Nangka di Kelurahan Dulalowo memiliki motivasi yang tinggi dalam mengelola usahanya. Hal ini diungkapkan dari ketua kelompok UPPKS Nangka yang juga sekaligus berprofesi sebagai *cleaning service* di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo bahwa selama menjadi ketua kelompok dalam usaha kerajinan daur ulang ini memberikan tambahan pekerjaan bagi dirinya dan anggota kelompok. Selama ini anggota kelompok pekerjaannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), namun setelah di bentuk kelompok UPPKS Nangka kami punya aktivitas yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi keluarga. Beberapa produk kerajinan yang kami bersama anggota sudah ada yang pesan, bahkan minta di buat sesuai keinginan. Namun dari segi jumlah permintaan masih terbatas dan harganya pun tidak mahal sehingga keuntungannya pun sedikit. Dari segi peningkatan pendapatan keluarga, hal ini juga dikemukakan ketua kelompok bahwa peningkatan pendapatan kami belum terlihat dan belum kami rasakan mengingat tadi permintaan dan harga yang masih minim. Kelompok untuk saat ini belum berfikir untuk pendapatan yang besar dari usaha ini, namun bagi kelompok bagaimana kegiatan ini berjalan dan ada aktivitas anggota, serta modal yang kami gunakan bisa kembali. Lebih lanjut, modal salam kegiatan usaha kelompok Nangka masih berasal dari modal sendiri atau modal patungan, seperti pembelian Cat dan Lem, untuk bahan baku plastiknya dari barang-barang bekas yang kami gunakan dalam rumah tangga atau dari tetangga-tetangga, seperti botol plastik yang tidak digunakan lagi. Untuk bantuan pada kelompok UPPKS Nangka belum ada dari Pemerintah, jadi kesulitan dalam operasional kelompok. Selama ini anggota kelompok hanya aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Berdasarkan manfaat dari program UPPKS kepada kelompok dan anggotanya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa program UPPKS pada Kelompok Nangka yang terdapat di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo belum merasakan adanya peningkatan pendapatan dengan usaha yang dijalankan kelompok Nangka. Hal ini dikarenakan, minimnya intervensi yang dilakukan sektor pemerintah dan swasta, kelompok masih berjalan sendiri dalam operasional usaha, modal usaha masih secara patungan anggota kelompok, dan terbatasnya permintaan pada produk kelompok usaha.

Hal ini bertentangan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu, sebagaimana dari Heryendi dalam Susianti (2017) bahwa pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat meningkatkan fungsinya secara optimal.

Hasil penelitian Susianti (2017) membuktikan bahwa terdapat kelompok UPPKS di masih berjalan dan berkembang, bahkan ada kelompok yang telah berkembang menjadi koperasi. Keberadaan usaha ekonomi ini membuat perputaran modal lebih baik, dan akan memberikan keuntungan bagi anggota maupun kelompok jika anggota maupun kelompok lebih mengembangkan usahanya. Keberhasilan lain dari program UPPKS yaitu akses peminjaman modal yang berkelanjutan. Kondisi ini disebabkan kelompok mempunyai komitmen dan tingkat kesadaran yang tinggi dalam pengembalian pinjaman modal yang sebelumnya secara tertib dan penuh tanggungjawab. Selanjutnya, terjadi perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat (anggota UPPKS) secara signifikan yang dinilai dari aspek jam kerja dan pendapatan pada saat sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS. Kondisi ini menjelaskan bahwa keluarga khususnya Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera I mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pembelajaran usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga.

Hambatan Pelaksanaan Program UPPKS

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan program UPPKS pada Kelompok UPPKS Nangka Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo muncul berbagai

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti lemahnya integrasi program UPPKS dengan program instansi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan usaha berjalan di tempat. Pada tingkat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kelompok UPPKS seperti pertemuan sosialisasi atau pelatihan. Minimnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga di kampung KB. Hambatan yang paling mempengaruhi pelaksanaan program UPPKS adalah dari aspek permodalan. Kelompok tidak mampu meningkatkan kegiatan usahanya karena menggunakan modal sendiri dan tidak adanya bantuan modal dari pemerintah. Kemudian, hambatan lainnya minimnya pendampingan yang diberikan kepada kelompok UPPKS, yang lebih berperan selama ini hanya Petugas Balai Penyuluh KB Kota Selatan. Aspek pemasaran dari kegiatan usaha tidak ada, permintaan hanya berdasarkan pesanan (*by order*).

Hambatan yang telah dikemukakan di atas di pertegas alam Buku Info Demografi Tahun 2017 BKKBN bahwa mewujudkan tujuan program UPPKS tidaklah mudah, banyak hambatan dan kendala dalam pengembangan kelompok UPPKS, seperti pada umumnya, kendala yang dihadapi terkait dengan permodalan, bahan baku, teknis produksi dan pemasaran hasil usaha. Selain itu juga kendala pendamping baik menyangkut pengetahuan maupun dana operasional. Padahal sudah selayaknya kegiatan UPPKS dilakukan dengan pendampingan yang berkesinambungan. Lebih lanjut, Pemerintah melalui BKKBN menggulirkan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok UPPKS, namun bantuan ini juga belum dapat digunakan sepenuhnya oleh kelompok UPPKS. Kendala yang dihadapi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPPKS, diantaranya yaitu masalah perijinan atau belum berbadan hukum. Salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu setiap kelompok UPPKS harus memiliki AD/ART dan berbadan hukum. Jika belum berbadan hukum, kadang diajarkan untuk bergabung dengan lembaga yang sudah berbadan hukum, seperti koperasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program UPPKS di Kampung KB Kelurahan Dulalowo dari segi kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun pelatihan di fasilitasi tempat oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Namun, belum adanya intervensi langsung dari pemerintah setempat dan swasta kepada kelompok UPPKS. Pada hal program UPPKS ini merupakan program Lintas Sektor yang di cetuskan oleh BKKBN. UPPKS merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program UPPKS sepenuhnya dilaksanakan oleh BPKB sebagai perpanjangan tangan BKKBN provinsi Gorontalo dan Dinas PPKB-PPPA Kota Gorontalo. Hal ini terlihat dari ketidak tahuan pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan tidak mengetahui jumlah kelompok UPPKS, nama-nama anggota UPPKS, dan jenis kegiatan yang dilakukan, dan intervensi apa saja yang sudah diberikan. Semuanya hanya di ketahui oleh petugas Balai Penyulu KB Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak program yang di laksanakan pada masyarakat berjalan sendiri-sendiri, tidak terdapat integrasi dari program satu ke program lainnya. Sehingga, konsep pemberdayaan juga berjalan sendiri-sendiri.

Manfaat peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dari program UPPKS belum terlihat dan dirasakan oleh kelompok. Hal ini terlihat dari program UPPKS pada Kelompok Nangka belum merasakan adanya peningkatan pendapatan dengan usaha yang dijalankan kelompok Nangka. Minimnya intervensi yang dilakukan sektor pemerintah dan swasta, kelompok masih berjalan sendiri dalam operasional usaha, modal usaha masih secara patungan anggota kelompok, dan terbatasnya permintaan pada produk kelompok usaha.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program UPPKS terlihat dari lemahnya integrasi program UPPKS dengan program instansi lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan usaha berjalan di tempat. Pada tingkat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa hanya berperan sebagai penyedia tempat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Kelompok UPPKS seperti pertemuan sosialisasi atau pelatihan. Minimnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga di kampung KB. Hambatan yang paling mempengaruhi pelaksanaan program UPPKS adalah dari aspek permodalan. Hambatan minimnya pendampingan yang diberikan kepada kelompok UPPKS. Hambatan pemasaran dari kegiatan usaha tidak ada, permintaan hanya berdasarkan pesanan (*by order*).

Berkaitan dengan pelaksanaan program UPPKS hendaknya di sosialisasikan secara intensif dan menyeluruh kepada *stakeholder*, jika perlu sebaiknya diduduk bersamakan dengan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan untuk mengkroyok program yang terdapat di Kampung KB khususnya program UPPKS. Aspek permodalan hendaknya menjadi perhatian demi keberlanjutan usaha kelompok UPPKS. Modal bukanlah dari seluruh aktivitas usaha akan tetapi modal menjadi mesin penggerak usaha. Hendaknya sumber pembiayaan dari berbagai sektor, terlebih dari pemerintah dan sektor pembiayaan (Bank dan Non Bank).

Hendaknya meningkatkan pelatihan keterampilan dan pemasaran secara berkesinambungan demi meningkatkan pengelolaan manajemen kelompok usaha, kualitas produk, dan peningkatan penjualan usaha. Hal ini bisa menjadi faktor non ekonomi yang dapat menunjang dan berkembangnya kelompok UPPKS. Kota Gorontalo pada umumnya Kecamatan Kota Tengah pada khususnya hendaknya mengembangkan terus kelompok-kelompok UPPKS. Karena program UPPKS dapat menjadi *role model* dalam pemberdayaan masyarakat meningkatkan kesejahteraannya melalui penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya.

Persantunan

Ucapan terima kasih kami kepada Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek-Dikti atas pembiayaan yang diberikan pada pelaksanaan Penelitian Kompetitif Dosen Pemula. Kepada Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini.

REFERENSI

- Gusfrianti, Reni, Rahmita Budiartiningsih. 2010. *Peranan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau.
- Heryendi, W. T., & Marhaeni, A. I. (2013). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 78-85.
- Liana, Y. (2016). Peran Ibu Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Untuk. *Jurnal Dinamika DotCom*, 85-94.
- Mardiyono. (2016). Model Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB. *Jurnal Keluarga Berencana*, 1(1), 36-48.
- Muhajir, M., As' ad, A., & Ahmad Gani, A. (2018). The Values of Maccera Tappareng Ceremony In Buginese Society at Wajo Regency (Local Culture Analysis). Available at SSRN 3349531.
- Panorama, M. (2017). Pengaruh Kerja Sama Usaha terhadap Produktivitas Kerja Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) . *I-Economic*, 1-18.
- Puspitawati, H. (2013). Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. *Institut Pertanian Bogor*.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susianti. (2017). Efektivitas Program UPPKS Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi: Studi Kasus Kelurahan Srimartani, Piyungan, Bantul. *Journal of Business Administration*, 133-148.
- Suwondo. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "Sahabat" Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Semarang: Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.